

BAB IV PENUTUP

Paradigma program reformasi di bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap dunia perdagangan dan investasi di Cina. Penerapan liberalisasi perekonomian dalam negeri Cina tersebut didahului oleh adanya politik pintu terbuka yang berhubungan dengan perekonomian internasional. Sejak reformasi ekonomi tahun 1978, Cina telah mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa perusahaan berkelas internasional, yang merupakan hasil dari adanya peranan investasi asing beserta perusahaan-perusahaan Cina yang didukung oleh pemerintah pusat. Dalam mendukung program pengembangan perusahaan-perusahaannya, pemerintah Cina otomatis harus mengatur kembali kebijakan ekonomi yang diterapkan di dalam negeri, menyesuaikan hukum-hukum yang ada, dan melibatkan diri dalam pemberian izin kepada para investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Cina.

Masuknya perusahaan-perusahaan asing tersebut ke pasar dalam negeri Cina memberi peluang bagi Cina untuk melakukan alih teknologi karena perusahaan-perusahaan asing tersebut selain membawa modal, juga membawa teknologi yang dimilikinya ke Cina. Selain teknologi, keterampilan manajerial yang sangat dibutuhkan untuk menjadi perusahaan berkelas internasional pun juga dicontoh oleh perusahaan-perusahaan Cina, termasuk PMN Cina. Arus FDI yang terus mengalir tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Cina untuk meningkatkan daya saing beberapa PMN. Sejak dimulainya reformasi pada tahun 1979, Pemerintah Cina telah bertekad untuk mereformasi PMN yang dimilikinya. Tahun 1979 dicatat sebagai tahun diumumkannya rencana pemerintah untuk mereformasi PMN.

Pemerintah Cina antara tahun 1991-1997 membangun sebuah “Tim Nasional” yang merupakan perusahaan-perusahaan besar milik negara yang telah direformasi untuk dapat berperan dalam arena persaingan industri di tingkat global. Adapun “Tim Nasional” ini berjumlah 120 perusahaan raksasa dan bergerak di sektor: pelistrikan,

batu bara, otomotif, elektronika, besi dan baja, mesin, kimia, material untuk konstruksi, transportasi, ruang angkasa, obat-obatan. Semua perusahaan-perusahaan ini mendapatkan berbagai macam fasilitas dan dukungan finansial dari negara.

Setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan ekonomi yang fundamental, Cina pada akhirnya pun memunculkan kebijakan pemerintah untuk melakukan investasi ke luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah 走出去 *zou chuqu* (*go abroad*) atau '*go global*'. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan lokal Cina dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam di luar negeri, sehingga arus ODI pun mulai muncul pada awal abad ke-21 ini. Berdasarkan data statistik, terlihat bahwa dalam mengalirkan ODI nya perusahaan-perusahaan Cina lebih berorientasi pada negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Hal tersebut selain dikarenakan posisi geografisnya yang dekat, juga karena perusahaan Cina masih ingin belajar mengembangkan kemampuan membangun pasar yang lebih matang. Asia Tenggara sangat cocok dalam hal tersebut, karena selain memiliki sumber daya alam yang banyak, masyarakat Asia Tenggara juga memiliki daya beli yang cukup baik dibandingkan dengan kawasan sekitar Cina lainnya, seperti Asia Selatan dan Tengah. Selain itu, daya saing perusahaan-perusahaan lokal Asia Tenggara, masih belum terlalu kuat.

ODI Cina dilakukan dalam bentuk M&A (*merger and acquisitions*), dan *Greenfield*. Secara umum, tujuan ODI suatu negara adalah untuk mengakses sumber daya alam (energi dan bahan mentah), memperoleh teknologi, merek dagang dan keterampilan manajerial, serta menghindari friksi perdagangan. Diantara tujuan di atas yang terpenting bagi Cina dalam mengembangkan perusahaannya adalah mengakses sumber daya alam dan memperoleh teknologi, merek dagang, serta keterampilan. Hal itu disebabkan karena Cina merupakan negara yang memiliki sedikit sumber daya alam, belum memiliki teknologi tinggi yang memadai, merek dagang yang terkenal, serta keterampilan manajerial untuk mengolah perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Untuk kawasan ASEAN sendiri, tujuan utama ODI Cina adalah untuk mengakses energi dan bahan mentah, serta menghindari friksi

perdagangan. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk menunjang pertumbuhan ekonominya yang sangat membutuhkan beragam bahan mentah, seperti aluminium, tembaga, nikel, biji besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Alasan itulah yang menyebabkan kawasan ASEAN sangat penting bagi Cina.

Dalam hal menghindari friksi perdagangan, adalah terkait dengan adanya kompetisi perdagangan yang berlebih, penipisan kesempatan, dan overkapasitas pada banyak industri di pasar dalam negeri Cina, maka pemerintah Cina menghimbau perusahaan-perusahaan Cina untuk menginvestasikan modalnya ke luar negeri sebagai langkah untuk menciptakan sebuah perusahaan berbasis luar negeri (multinasional). Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah akses pasar lokal dan efisiensi ongkos produksi. Cina dewasa ini telah mengalami overkapasitas pada barang-barang produksi 'white goods', sehingga perusahaan Cina mengucurkan modalnya dengan mendirikan pabrik-pabrik baru di negara-negara ASEAN untuk memproduksi produk yang telah *overstocked* (kuantitasnya berlebih) di Cina.

Untuk mendekati negara-negara ASEAN, Cina dengan gigihnya berupaya dalam meningkatkan hubungannya dengan kawasan tersebut. Hal ini terlihat dari kuatnya keinginan Cina untuk bergabung dengan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang kemudian menghasilkan Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-Cina (*ACFTA-- ASEAN-China Free Trade Agreement*). Salah satu upaya yang dilakukan Cina untuk dapat 'mengambil hati' negara-negara di Asia Tenggara antara lain dengan cara *Charm offensive*. Ini dapat terlihat ketika Cina menyediakan dana melalui IMF sebesar US\$4,5 milyar untuk membantu Thailand dan Indonesia ketika krisis moneter menerpa kedua negara tersebut. Selain itu, Indonesia pun tidak luput dari "*Dollar Diplomacy*" yang dijalankan pemerintah Cina dalam mengakses bahan mentah. Pemerintah Cina seringkali menggunakan jalur diplomasi tersebut kepada negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah dengan cara penguatan hubungan perdagangan bilateral, memberikan hibah, dan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan seperti transportasi dan komunikasi. Indonesia sendiri telah menerima kucuran dana investasi dari pemerintah Cina sebesar US\$ 550 juta bagi beberapa proyek termasuk proyek pembangunan Jembatan Suramadu.

Peningkatan arus investasi Cina di Indonesia tersebut merupakan wujud nyata dari kebijakan Pemerintah Cina yang kian mendorong perusahaannya untuk melakukan investasi ke luar (*going-out strategy/go to the world*). Sesungguhnya penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation* pada 4 Nopember 2004 di Phnom Phen, Kamboja, diharapkan akan semakin mendorong arus investasi Cina ke Indonesia dan memberi pengaruh yang lebih signifikan terhadap hubungan ekonomi diantara dua negara, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak terwujud. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh ASEAN Secretariat, nilai investasi Cina setelah perjanjian tersebut (2004-2006) cenderung tidak ada peningkatan. Data realisasi investasi Cina yang dikeluarkan oleh BKPM Indonesia pun menunjukkan angka persentase yang tetap. Di sini dapat terlihat bahwa perjanjian tersebut tidak memberikan manfaat yang banyak bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi Cina dan hanya memberikan keuntungan bagi Cina dalam merealisasikan prioritas investasinya, yaitu mengakses energi dan bahan mentah, serta untuk menghindari friksi perdagangan dalam negerinya. Sebenarnya ACFTA sendiri memberikan pengaruh besar bagi kedua negara, terlebih lagi Cina sangat memandang penting Indonesia sebagai daerah tujuan investasinya di dunia. Namun, investasi Cina tidak berjalan sebagaimana diharapkan, hal tersebut terjadi terutama karena terhambat oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung investasi di Indonesia dan kurangnya informasi bagi investor Cina yang masih pemula dalam dunia investasi Indonesia, sehingga perencanaan ODI Cina yang ditargetkan masuk ke Indonesia tidak sepenuhnya terealisasikan.

Seiring dengan adanya peningkatan kerjasama ekonomi tersebut, Cina pun mulai turut serta menjadi pemain baru dalam negara-negara investor baik di ASEAN maupun di Indonesia. Namun, perjanjian ACFTA yang dipenuhi harapan tersebut ternyata masih belum berpengaruh bagi negara-negara tujuan investasi Cina di ASEAN, bahkan angka persentase realisasi investasi yang masuk ke Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan investasi Cina di ASEAN, cenderung tetap dan tidak memberikan dampak yang berarti. Kenyataan ini tentu merupakan tantangan bagi

Indonesia agar dapat menarik keuntungan yang lebih besar dari perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di kawasan dan tidak menjadi pihak yang dirugikan.

